

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, serta kemampuan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan diartikan sebagai suatu proses usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai dan dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya menjadi manusia yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia sesuai dengan sifat hakiki dan ciri-ciri kemanusiaannya (Jalaluddin dan Idi, 2018:9). Pendidikan memberikan pengaruh yang besar bagi manusia agar mampu bertahan hidup dengan membangun interaksi yang baik dengan sesamanya.

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Idealnya, pendidikan sudah diberikan sejak dini agar nilai yang ada di dalam pendidikan tersebut semakin mudah diterapkan ketika dewasa. Pendidikan ini dapat dilakukan oleh lembaga sekolah (formal) maupun lingkungan keluarga (informal) dan masyarakat (non formal). Setiap kegiatan pendidikan hampir selalu melibatkan unsur-unsur yang terkait di dalamnya. Unsur-unsur tersebut yaitu (1) peserta didik, (2) pendidik, (3) tujuan, (4) isi pendidikan, (5) metode, dan (6) lingkungan (Achmad, 2004:4).

Demokrasi merupakan suatu terminologi yang sarat dengan makna hal ini disebabkan oleh pengertiannya yang berkaitan erat dengan sistem sosial yang mendukungnya. Terbaik pada saat ini hampir semua negara yang ada di dunia menyatakan bahwa sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Meskipun demikian arti yang diberikan kepada demokrasi tersebut tidak sama, namun setiap negara akan selalu mengatakan bahwa negaranya berdasarkan pada asas-asas demokrasi Martosoewignjo (1992). Dapat pula kita ketahui bahwa demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara dan masyarakat. Pada suatu negara yang sistem pemerintahannya demokrasi maka warga negaranya berpartisipasi dalam pemerintahan melalui para wakil-wakilnya yang berada di DPR yang telah dipilih melalui proses pemilihan umum. Pemerintahan dalam negara demokrasi pada umumnya menjamin terciptanya keadilan, penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bangsa Indonesia ingin mewujudkan nilai-nilai demokrasi yaitu suatu masyarakat yang demokratis. Masyarakat demokratis atau di dalam khasanah Bahasa Indonesia disebut masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang mengakui hak-hak asasi manusia (HAM). Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang terbuka dimana setiap anggotanya merupakan pribadi yang bebas dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakatnya dengan mengakui perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakatnya.

PPKn merupakan mata pelajaran pendidikan moral, pendidikan moral yang merupakan suatu usaha membimbing perkembangan kepribadian peserta didik yang berlandaskan Pancasila. Oleh sebab itu, pendidikan PPKn di setiap lembaga pendidikan harus tetap dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. PPKn juga sebagai sarana untuk mengembangkan potensi kepribadian peserta didik dengan mengangkat tema perkembangan IPTEK yang terjadi dalam lingkungan pendidikan.

Pembelajaran PPKn diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai demokrasi dan UUD NRI 1945. Kehidupan dalam dunia pendidikan sekarang ini yang disertai dengan perkembangan dunia teknologi yang semakin kompleks menuntut guru untuk dapat mengarahkan dan memotivasikan siswa dalam kegiatan yang melibatkan mereka untuk bertindak secara demokratis dengan menciptakan proses belajar mengajar yang menarik, kreatif, dan inovatif. Misalnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya serta berpendapat secara demokratis, tentu ini sangat membantu memotivasi siswa untuk merealisasikan kehidupan yang demokratis dilingkungan sekolah, dan siswa mampu menerapkannya baik di lingkungan pendidikan, maupun dilingkungan keluarga, dan dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak di tuju oleh pendidikan (Hidayat dan Abdillah, 2019:25). Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Hidayat dan Abdillah, 2019:26).

Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7, bahwa seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mempelajari, mendalami dan mengembangkannya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendalaman,

penghayatan, pengembangan terhadap Pancasila tentulah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang dengan memperhatikan potensi yang ada padanya. Tingkat-tingkat pembelajaran mengenai Pancasila karena itu dapat dihubungkan dengan tingkat-tingkat pengetahuan ilmiah. Menurut Kaelan (1999:15) tingkatan pengetahuan ilmiah terbagi menjadi empat yakni pengetahuan deskriptif, pengetahuan kausal, pengetahuan normatif, dan pengetahuan esensial. Pengetahuan deskriptif menjawab pertanyaan bagaimana, yakni memberikan keterangan, penjelasan yang objektif tanpa adanya unsur subjektivitas. Pancasila dapat diuraikan secara objektif misalnya dalam perspektif kajian sejarah perumusannya, kedudukan dan fungsinya, dan sebagai dasar, ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pengetahuan kausal memberikan jawaban terhadap pertanyaan ilmiah mengapa, sehingga sifat jawabannya adalah tentang sebab akibat.

Menurut para ahli, pendidikan Pancasila adalah pendidikan yang memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Konsep ini meliputi aspek moral, sosial, budaya, dan politik. Tujuan dari pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk karakter yang kuat, nasionalis, dan mencintai tanah air. Menurut Kaelan (2016:9) Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat, lebih dari itu Pancasila kerap disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia. Indonesia pun disatukan lewat Pancasila yang berisi lima bunyi. Kelima sila tersebut digunakan sebagai pedoman hidup masyarakat atau menjadi bahan pembelajaran bagi para peserta didik diperoleh oleh setiap orang, yang awalnya sembilan tahun, sekarang diperpanjang menjadi dua belas tahun yaitu berawal SD, SMP hingga SMA.

Materi yang wajib ada pada kurikulum dasar yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah suatu pelajaran yang diterapkan menjadi sarana untuk membangun nilai moral dan luhur yang berasal dari budaya bangsa. Menurut Aji (2013:31), PPKn adalah suatu pelajaran yang memiliki tugas untuk membentuk moral, nilai, dan kaidah secara menyeluruh dan seimbang, PPKn bertujuan untuk mencetak masyarakat yang baik, yaitu yang mau, tahu dan sadar terhadap hal dan kewajiban dirinya. Sejatinya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah studi mengenai kehidupan

keseharian kita, memberi arahan untuk mewujudkan penduduk yang berbudi sesuai dengan Pancasila. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berfungsi untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri generasi penerus bangsa (Magdalena dkk., 2020) . Agar fungsi tersebut dapat dicapai, maka perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dengan cara belajar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura?
2. Apa saja kendala implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura tahun 2026.
2. Mengeksplorasi berbagai kendala dalam implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura tahun 2026.
3. Mendeskripsikan solusi mengatasi kendala implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura tahun 2026.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan terkait dengan implementasi pendidikan demokrasi melalui Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kendala yang terjadi pada implementasi pendidikan demokrasi melalui Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah Kartasura.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan solusi mengatasi kendala implementasi pendidikan demokrasi melalui Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Guru, sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Pancasila yang mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi
- b. Bagi Sekolah, sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan budaya sekolah yang demokratis
- c. Bagi Siswa, sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam sehari-hari.